

Penerapan Ideologi Nasional Melayu Islam Beraja Brunei Darussalam

(Studi Kasus Pengaruh Kebijakan Syariah Penal Code Order Terhadap HAM)

Nama: Hanum Juselvia Azzahra

NPM: 193607516074

Dosen Pengampu: Adilita Pramanti, S.Sos., M.Si.





PENDAHULUAN

✓ LATAR BELAKANG MASALAH

Brunei merupakan salah satu negara yang berada dikawasan Asia Tenggara serta negara yang bentuk pemerintahannya masih menggunakan sistem kerajaan. Dipimpin oleh seorang sultan yakni Sultan Hassanal Bolkiah. Ideologi Nasional yang dianut dari negara ini yakni MIB (Melayu Islam Beraja) dimana bertopang pada 3 prinsip yakni Budaya Melayu, Syariat Islam, dan Sistem Kerajaan.

Masyarakat yang memiliki budaya melayu umumnya dikatakan pula beragama muslim, meski tidak semuanya. Dalam hal ini sultan brunei rupanya memiliki tujuan untuk dapat membangun negaranya menjadi negara yang menjalankan syariat islam dimana segala bentuk peraturan dan undang undang berlandaskan pada agama islam.

Kebijakan yang disorot oleh masyarakat internasional yakni ketika brunei mendeklarasikan penerapan hukum syariah dinegaranya atau dikenal dengan SPCO (*Syariah Penal Code*). Dimana kebijakan ini mencakup pola tindakan penyimpangan seperti halnya lgbt, pelaku zinah, dan hal lainnya yang jelas bertentangan HAM, sebaliknya hal ini merupakan hak brunei sebagai negara berdaulat selaras dengan nilai ideologi yang dianut.



RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

'bagaimana pola penerapan kebijakan hukum syariah dalam kecaman internasional?'

✓ TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah:

- untuk mengetahui pengaruh kebijakan syariah terhadap minoritas di brunei darussalam
- untuk mengetahui seperti apa pola penerapannya yang dianggap melanggar aturan HAM

✓HIPOTESIS

Hipotesis dari permasalahan ini yakni kebijakan yang diusung brunei merupakan suatu tujuan sultan hassanul bolkiah yang menginginkan terwujudnya suatu negara brunei darussalam yang berdiri sesuai dengan hukum syariah islam merujuk kepada ideologi nasionalnya yakni melayu islam beraja (MIB). Jatidiri negara brunei sebagai negara yang memiliki budaya melayu islam yang fundamentalis dan menjadi satusatunya negara yang berani mengusung hukum pidana syariah di asia timur dan tengara dalam tingkat nasionalnya. Banyaknya kecaman dari pihak internasional terhadap brunei tidak serta merta begitu saja di hiraukan oleh brunei sebab hal tersebut merupakan hak politik dalam negerinya sebagai negara yang berdaulat.

TINJAUAN PUSTAKA

✓ TEORI IDENTITAS NASIONAL

Setiap bangsa memiliki kecirikhasannya masing masing yang mana hal tersebut menjadikannya sebagai suatu pembeda daripada bangsa lain dan menunjukan sisi kecirikhasan tersebut dalam bentuk suatu identitas nasional.

Identitas nasional dianggap sebagai konsep utama dari identifikasi individu pada kelompok sosial dalam dunia modern (davidov, 2009). Kelekatan anggota kelompok terhadap negara mereka diekspresikan dengan rasa memiliki, cinta, loyalitas, kebanggaan, dan perlindungan terhadap kelompok dan tanah air-nya (davidov, 2009).

Tajfel dan turner (1986) menyatakan bahwa secara umum identitas nasional menggambarkan perasaan yang subjektif terhadap suatu bangsa, yang pada dasarnya bersifat positif. Sejalan dengan pendapat tersebut, blank, schmidt dan westle (2001) menggambarkan identitas nasional sebagai perasaan kedekatan yang kuat terhadap negara sendiri.



Sebagai salah satu negara berdaulat serta keunggulan sistem monarki yang bisa diartikan berbalik daripada bentuk demokrasi. Brunei bisa membuktikan bahwsanya sistem monarki yang mereka terapkan mampu menyimbangi kesejahteraan dengan negara negara demokrasi lainnya. Dibuktikan dengan minimnya angka kriminal, keadaan yang harmonis dan aman tentu hal tersebut disebabkan oleh upaya ketegasan sang sultan yang iimbangi dengan pola kesadaran masyarakatnya.

Demikian kiranya kebijakan atau aturan yang diusung merupakan langkah brunei guna menjaga keamanan dan keharmonisan negara yang mana berusaha untuk tetap menanamkan nilai budaya yang telah lama ada dan sudah menjadi suatu pola kebiasaan yang nyatanya berhasil melahirkan keadaan yang sangat baik dan sejahtera. Serta sebagai upaya untuk kiranya memfilterisasi pengaruh asing khususnya budaya barat yang dianggap terlalu hedonis dan individualis.

• METODOLOGI

✓ METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri, bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistic dan dengan cara deskripsi.

✓ SUMBER DATA

Sumber data yang didapat yakni berupa data sekunder yang merupakan hasil penelitian yang sudah ada berupa karya tulis ilmiah yang mana memberikan inspirasi atau gambaran bagi peneliti untuk bisa dikembangkan lebih lanjut.

✓ TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan melalui metode studi pustaka yang diperoleh dengan data literature baik buku, jurnal ilmiah, dan sumber artikel ilmiah.



Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana berusaha untuk medeskripsikan bagaimana pengaruh kebudayaan islam di negara brunei hingga pola penerapannya kepada kebijakan syariah penal code. Yang mana penelitian ini melalui tinjauan analisis data yang generalisasinya di interpretasi tanpa menggunakan basis numerik atau bukan angka tetapi atas dasar interpretasi kalimat atau data, bernuansa kebijakan.



TERIMA KASIH